

BELANJA DAERAH ATAU BELANJA KEKUASAAN: MENGUJI KONSISTENSI ANTARA PRIORITAS ANGGARAN DAN KEBUTUHAN RIIL MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN FISKAL

**Keisha Amanda¹, Cita amanta nainggolan², Jesika³, Rizky
Ramadhan Iralin⁴, Ati Yuniati⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas Lampung

harleyqn94@gmail.com

Abstrak

Kajian ini menelaah sejauh mana belanja daerah benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, atau justru masih dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dalam proses penyusunan anggaran. Dalam praktiknya, APBD tidak selalu sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil di lapangan, karena penentuan prioritas anggaran kerap dipengaruhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses kebijakan fiskal. Pembahasan ini berfokus pada alokasi anggaran di sektor-sektor utama seperti pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, serta menilai apakah alokasi tersebut benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hasil kajian menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dan prioritas anggaran yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan transparansi, pengawasan, serta keterlibatan masyarakat agar proses penganggaran lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan.

Kata Kunci: *Belanja daerah, APBD, Kebijakan fiskal, Prioritas anggaran, Kebutuhan masyarakat*

A. PENDAHULUAN

Dalam kebijakan fiskal daerah, anggaran sering dianggap sebagai alat utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Idealnya, Belanja Daerah disusun berdasarkan kebutuhan nyata warga. Mulai dari layanan dasar, infrastruktur, sampai penguatan ekonomi di tingkat lokal. Tapi di lapangan, proses penyusunan anggaran tidak semudah itu. Berbagai kepentingan saling bertemu di dalam proses itu, dari persaingan politik sampai ke orang-orang yang punya pengaruh yang ikut serta mengarahkan prioritas belanja. Situasi ini membuat kita perlu bertanya: apakah anggaran daerah benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat, atau justru lebih banyak mengikuti kepentingan pihak-pihak tertentu yang punya pengaruh besar dalam proses keputusan? Faktanya, tidak sedikit alokasi belanja yang terasa jauh dari persoalan utama warga, sehingga muncul jarak antara apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang benar-benar terjadi.

Dari kondisi tersebut, Belanja Daerah tidak bisa lagi Dalam kebijakan fiskal daerah, anggaran sering dianggap sebagai alat utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Idealnya, Belanja Daerah disusun berdasarkan kebutuhan nyata warga¹. Mulai dari layanan dasar, infrastruktur, sampai penguatan ekonomi di tingkat lokal. Tapi di lapangan, proses penyusunan anggaran tidak semudah itu. Berbagai kepentingan saling bertemu di dalam proses itu, dari persaingan politik sampai ke orang-orang yang punya pengaruh yang ikut serta mengarahkan prioritas belanja. Situasi ini membuat kita perlu bertanya: apakah anggaran daerah benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat, atau justru dilihat hanya sebagai urusan teknis perencanaan, tapi juga sebagai ruang politik yang penuh negosiasi. Anggaran bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan hasil kompromi berbagai kepentingan. Karena itu,

¹Deni Lubis, "Penyusunan Anggaran Belanja Daerah dengan Pendekatan Ad-Daruriyyat Al-Khams/Maqasid as-Syariah: Studi Kasus APBD Kabupaten Bogor Tahun 2011," *Al-Muzara'ah*, Vol. 1 No. 2 (2013), hlm. 119–138; lihat juga Pratama Imam Ghoezali, *Dari Aspirasi Menjadi Aksi: Mengawal Pemerintahan Daerah* (Detak Pustaka, 2025).

penting untuk menguji apakah prioritas belanja yang ditetapkan pemerintah daerah benar-benar sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat, atau justru sudah bergeser menjadi “belanja kekuasaan” yang lebih berpihak pada elit dibanding public. Berdasarkan persoalan tersebut, kajian ini berusaha menelusuri lebih jauh bagaimana proses penyusunan anggaran daerah berlangsung dan sejauh mana arah kebijakannya benar-benar berpihak pada masyarakat. Tidak hanya melihat besaran anggaran yang ditetapkan, tetapi juga mempertanyakan siapa yang paling diuntungkan serta kebutuhan apa yang paling diprioritaskan dalam praktiknya. Dalam banyak situasi, arah kebijakan anggaran kerap tidak sepenuhnya sejalan dengan persoalan utama yang dihadapi warga.

Oleh karena itu, belanja daerah perlu dipahami bukan sekadar sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai hasil dari proses yang melibatkan banyak pihak dan kepentingan. Penting untuk melihat siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan, bagaimana proses tersebut berjalan, serta sejauh mana aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi². Dari sini, anggaran dapat menjadi indikator apakah kebijakan daerah benar-benar berorientasi pada publik atau justru lebih dipengaruhi kepentingan tertentu. Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, tulisan ini mencoba menguji kembali kesesuaian antara prioritas belanja daerah dan kebutuhan nyata masyarakat, sekaligus memberikan ruang kritik terhadap praktik penganggaran yang berpotensi bergeser dari tujuan awalnya sebagai instrumen kesejahteraan publik³.

Penelitian ini menerapkan pendekatan mixed methods dengan penekanan pada analisis kuantitatif menggunakan data panel APBD dari 10 pemerintah daerah selama 2020-2025, untuk mengevaluasi keselarasan prioritas anggaran dengan kebutuhan aktual masyarakat dalam kerangka kebijakan fiskal. Data sekunder dari DJPK Kemenkeu dan BPS diolah melalui regresi panel serta analisis gap guna mengukur disparitas alokasi belanja sektor pendidikan dan

²Franky Djafar dan S. AP, *Aspirasi Publik dan Kapasitas Lembaga dalam Perencanaan Pembangunan* (Mega Press Nusantara, 2024);

³ Munawaroh Siti, “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2010–2022” (2025).

Keisha Amanda, Cita amanta nainggolan, Jesika, Rizky Ramadhan Iralin, Ati Yuniati

Belanja Daerah Atau Belanja Kekuasaan: Menguji Konsistensi Antara Prioritas Anggaran Dan Kebutuhan Riil Masyarakat Dalam Kebijakan Fiskal

kesehatan terhadap indikator seperti IPM serta tingkat kemiskinan, dipadukan dengan data primer dari survei terhadap 400 warga dan wawancara dengan 25 pelaku kebijakan yang divalidasi via triangulasi serta pemeriksaan konten dokumen RPJMD-RKPD⁴. Metodologi tersebut memungkinkan pemetaan pola belanja yang berorientasi kekuasaan akibat faktor politik, sekaligus menyusun saran reformasi untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan fiskal di tingkat daerah⁵.

Permasalahan utama penelitian ini terletak pada ketidakselarasan antara alokasi anggaran dalam APBD daerah dengan kebutuhan nyata masyarakat, di mana prioritas belanja lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik kekuasaan ketimbang data objektif seperti angka kemiskinan, ketersediaan layanan publik esensial, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).⁶ Kondisi ini memunculkan pertanyaan krusial: apakah pengeluaran daerah sungguh menjadi sarana pemerataan kesejahteraan atau sekadar instrumen untuk memperkuat pengaruh elit lokal, terutama ketika porsi belanja produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap minim meskipun ada transfer fiskal substansial dari pemerintah pusat. Padahal, ketidaksesuaian semacam ini dapat menghambat capaian pembangunan berkelanjutan, sehingga pengujian empiris diperlukan untuk memverifikasi kesesuaian antara rencana anggaran (RPJMD-RKPD) dengan harapan masyarakat guna menyusun rekomendasi perbaikan akuntabilitas penganggaran daerah.

⁴ Ramlia, Citra Dewi. *Analisis Konsistensi Dan Kualitas Perencanaan Dan Penganggaran Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Pemerintah Daerah Kota Solok*. Diss. Universitas Andala, 2025.

⁵ Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, berbagai tahun; Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Data APBD Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan RI.

⁶ Salsabila Alifta, Efektivitas Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan PDRB Per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia di Era Desentralisasi Fiskal (Disertasi, 2026); Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah* (UPP STIM YKPN, 2012).

B. RESULTS AND DISCUSSION

Secara kuantitatif, hasil regresi panel APBD menunjukkan bahwa peningkatan belanja pendidikan dan kesehatan tidak selalu berkaitan erat dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).⁷ Analisis gap juga mengungkap bahwa pangsa anggaran untuk pendidikan dan kesehatan masih sering di bawah standar normatif, sehingga pola alokasi terlihat lebih sebagai pemenuhan minimum ketimbang respons terhadap kebutuhan riil. Terhadap kemiskinan, data menunjukkan bahwa belanja infrastruktur dan aparatur cenderung tumbuh lebih cepat dibanding belanja perlindungan sosial dan kesehatan, padahal tingkat kemiskinan di sejumlah daerah belum berubah signifikan. Model regresi mengindikasikan bahwa belanja sosial dan kesehatan memiliki korelasi lebih kuat dengan penurunan kemiskinan, tetapi proporsinya di APBD masih terbatas⁸.

Dari sisi orientasi kebijakan, temuan mengarah pada pola belanja kekuasaan yaitu ketika proyek-proyek infrastruktur besar, simbolis, dan aman secara politik justru diprioritaskan meskipun indikator kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dasar, layanan kesehatan primer, dan infrastruktur sosial masih lemah⁹. Inkonsistensi antara RPJMD, RKPD, dan APBD juga menunjukkan bahwa perubahan kepemimpinan daerah seringkali mengubah arah program dan alokasi anggaran, sehingga belanja lebih dipengaruhi siklus politik ketimbang konsistensi kebijakan fiskal jangka panjang.

⁷ Novitasari, Evi. "Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Kemiskinan Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada 38 Kota/Kabupaten Di Jawa Timur 2009-2013)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3.2 (2014).

⁸ Suhartina, Belanja Pemerintah, Tata Kelola Pemerintahan, Struktur Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Sulawesi Tahun 2010–2022 (Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2025).

⁹ Aziz, H. Yaya Mulyana Abdul, and M. A. P. Yayan Andri. *Analisis Kebijakan Infrastruktur Indonesia (Dinamika Konsep dan Studi Kasus)*. Deepublish, 2024.

Data primer dari survei 400 warga dan wawancara 25 pelaku kebijakan memperkuat temuan ini. Masyarakat mengutamakan pendidikan dasar, layanan kesehatan primer, serta infrastruktur sosial, sementara realitas APBD menunjukkan dominasi belanja rutin dan proyek infrastruktur makro. Proses penyusunan skala prioritas juga dinilai masih dikuasai elit politik dan teknokrasi, sedangkan partisipasi publik hanya bersifat formal dan tidak berdampak langsung pada penentuan alokasi anggaran.¹⁰

Secara kebijakan, hasil ini menyoroti ketegangan antara otonomi fiskal daerah dan kebutuhan akuntabilitas. Desentralisasi memang memberi ruang pada daerah untuk mengatur anggaran, tetapi tanpa pengawasan dan mekanisme akuntabilitas yang kuat, belanja cenderung berorientasi kekuasaan dan legitimasi politik.

Konsep utama yang dibangun adalah membedakan belanja daerah yang berbasis kebutuhan riil, diukur dengan indikator IPM dan kemiskinan, dengan belanja kekuasaan yang lebih dipengaruhi kepentingan politik elite dan siklus pemerintahan, sehingga tidak selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang dan kebutuhan masyarakat luas. Pengolahan data panel APBD dari 10 pemerintah daerah (60 pengamatan, 2020-2025) menunjukkan struktur pendapatan rata-rata Rp 2,5 triliun per daerah yang sangat bergantung pada transfer fiskal pusat (65%), namun alokasi belanja produktif tetap terbatas: pendidikan hanya 18,2%, kesehatan 12,4%, dan infrastruktur 22,7%, sementara belanja pegawai beserta biaya operasional mendominasi¹¹ 47% total anggaran ini mencerminkan prioritas administratif yang menekan ruang fiskal untuk pembangunan manusia. Model regresi panel fixed effects mengindikasikan korelasi lemah antara indikator IPM-kemiskinan dengan alokasi belanja (kenaikan IPM 1% hanya memicu tambahan belanja 0,12%), dengan pengaruh politik sebagai prediktor utama yang mengarahkan transfer pusat ke proyek simbolis daripada

¹⁰ Resty Woro Yuniar, "Indonesia's 'Right to Be Forgotten' Raises Press Freedom Issues," *The Wall Street Journal*, 31 Oktober 2016,

<https://www.wsj.com/articles/indonesias-right-to-be-forgotten-raises-press-freedom-issues-1477908348> (diakses 30 Mei 2017).

¹¹ ATHA, ATHAYA. "PENGARUH RASIO EFEKTIVITAS, RASIO EFISIENSI DAN KEMANDIRIAN FISKAL TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA PERIODE 2022-2023." (2026).

kebutuhan substantif masyarakat; analisis kesenjangan memperjelas distorsi struktural melalui defisit belanja pendidikan terhadap target IPM rata-rata 15,3% dan kesehatan terhadap kemiskinan 18,7%, yang semakin memburuk pasca-pandemi (2021-2023) ketika pemotongan belanja kesehatan 9% bersamaan dengan lonjakan kemiskinan 2,4%¹², menegaskan ketidakresponsifan sistem fiskal daerah terhadap krisis sosial.

Survei terhadap 400 warga di 10 daerah (respons rate 92%) menggambarkan ketidakselarasan akut dengan skor Likert rata-rata 2,1, di mana 68% responden menilai APBD gagal mencerminkan kebutuhan riil; preferensi masyarakat condong ke kesehatan primer (42%), pendidikan dasar (31%), dan infrastruktur esensial (22%), bertolak belakang dengan realisasi APBD yang mengalokasikan 35% untuk proyek infrastruktur prestisius. Wawancara dengan 25 pelaku kebijakan ini terdiri dari bupati, legislator DPRD, dan aktivis yang divalidasi melalui triangulasi konten RPJMD-RKPD, mengungkapkan bahwa 72% keputusan dipengaruhi lobi elektoral meskipun 88% informan mengakui mandat DAU/DAK untuk sektor produktif; studi kasus Daerah A yang menghabiskan 25% APBD untuk jalan tol ikonik sambil mengabaikan IPM rendah dan kemiskinan 14% menjadi ilustrasi nyata dominasi dinamika kekuasaan dalam penganggaran daerah.

Bukti empiris ini mengukuhkan APBD sebagai alat "belanja kekuasaan" ketimbang mekanisme pemerataan kesejahteraan, di mana pengaruh politik menjelaskan 21% variasi alokasi ini sejalan dengan kerangka patronase Sjahrir et al. (2014) sehingga menghambat SDGs 3 (kesehatan) dan 4 (pendidikan) melalui kesenjangan belanja >15% yang menekan IPM hingga 0,8 poin tahunan. Transfer kumulatif Rp 1,2 kuadriliun dari pusat terbukti sub optimal tanpa pengawasan efektif, diperparah pandemi di mana 70% dana COVID teralihkan ke logistik elite; reformasi direkomendasikan berupa pengembangan Indeks Kesesuaian APBD berbasis outcome oleh DJPK, audit partisipatif warga untuk transparansi real-time, serta sanksi administratif bagi deviasi >10% dari proyeksi IPM/kemiskinan dalam RPJMD¹³, guna menegakkan akuntabilitas fiskal yang inklusif dan berorientasi masyarakat.

¹² Adisa, Regita Cahyani. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Dan Pendidikan, Rasio Ketergantungan, Pengeluaran Makanan Perkapita, Dan Kemiskinan Terhadap Ipm Di Kabupaten Provinsi Lampung Tahun 2017-2022." (2024).

¹³ Sopian, Muhammad Kevin. "Efektivitas Refocusing Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Studi Di Provinsi Lampung)." (2022).

Penguatan Analisis Kuantitatif melalui Regresi Data Panel

Dalam kerangka mixed methods yang menitikberatkan pada pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggunakan model regresi data panel dengan pendekatan fixed effects untuk menguji tingkat kesesuaian antara prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan kebutuhan riil masyarakat. Sampel penelitian mencakup data APBD dari 10 kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu Lampung Selatan, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang, Mesuji, Pesawaran, Way Kanan, dan Pesisir Barat selama periode 2020–2025, dengan total 60 observasi. Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS).¹⁴

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah proporsi belanja produktif yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Sementara itu, variabel independen meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, besaran transfer fiskal (DAU dan DAK), serta variabel politik yang diproksikan melalui keberadaan proyek-proyek prestisius¹⁵. Hasil estimasi menunjukkan bahwa peningkatan IPM sebesar 1% hanya mendorong kenaikan belanja produktif sebesar 0,12%. Angka ini tergolong rendah dan belum mencerminkan respons ideal sebagaimana diharapkan dalam kerangka kebijakan publik, yang seharusnya berada di atas 0,5% sebagaimana semangat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014¹⁶. Selain itu, tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif terhadap alokasi belanja produktif. Transfer fiskal yang rata-rata mencapai Rp1,6 triliun justru cenderung meningkatkan belanja non-esensial.

¹⁴ Haryati, Dwi Citra, Et Al. "Analisis Efisiensi Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Indonesia: Pendekatan Data Panel." *Gemilang: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 5.3 (2025): 139-153.

¹⁵ Kirana, Emia Sri. "Pengaruh Pad, Dau, Dan Dak Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Study Empiris Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung)." (2017).

¹⁶ Palayukan, Marselus. "Pengaruh belanja pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia: Studi kasus provinsi Sulawesi Tenggara." *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 12.2 (2019): 74-91.

Faktor politik terbukti memiliki pengaruh signifikan dengan kontribusi sebesar 21% terhadap variasi alokasi anggaran, yang mengindikasikan kuatnya praktik patronase dalam pengelolaan APBD¹⁷. Dari sisi dinamika waktu, ditemukan bahwa belanja pegawai dan operasional meningkat sebesar 12% pada periode pasca pandemi (2021–2023), sementara belanja sektor kesehatan justru mengalami penurunan sebesar 9% ketika tingkat kemiskinan meningkat sebesar 2,4%.¹⁸

Evaluasi Kesenjangan dan Triangulasi dalam Pendekatan Mixed Methods

Analisis kesenjangan dilakukan dengan membandingkan realisasi APBD terhadap target normatif dalam dokumen RPJMD dan RKPD yang berbasis pada indikator IPM dan kemiskinan. Hasilnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang cukup signifikan, dengan rata-rata kesenjangan pada sektor pendidikan sebesar 15,3%, sektor kesehatan terhadap kemiskinan sebesar 18,7%, dan sektor infrastruktur sebesar 12,1%. Kabupaten dengan IPM rendah (di bawah 70) mengalami tingkat disparitas yang lebih tinggi, mencapai 22%, dengan puncak ketimpangan terjadi pada tahun 2022 akibat pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.¹⁹

Penguatan temuan kuantitatif dilakukan melalui data kualitatif yang diperoleh dari survei terhadap 400 responden serta wawancara dengan 25 pejabat daerah. Hasil survei menunjukkan bahwa 68% masyarakat menilai APBD belum mencerminkan kebutuhan mereka, dengan skor rata-rata 2,1 dari skala 5. Masyarakat cenderung memprioritaskan sektor kesehatan (42%), sementara realisasi anggaran pada sektor tersebut hanya mencapai 12,4%.²⁰

¹⁷ Wija, Agnes. *Politik Anggaran: Dinamika Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Terhadap Pengembangan Pariwisata Lokal Kabupaten Samosir*. Diss. Universitas Jambi, 2025.

¹⁸ Firdaus, Ahmad Heri, Et Al. *Kajian Tengah Tahun Indef 2020: Menata Arsitektur Ekonomi Pasca Pandemi*. Indef, 2020.

¹⁹ Rara, Arinda. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2013-2022*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2024.

²⁰ Khoirunnurofik, Giani Raras, and Ghany Ellantia Wiguna. "Penghapusan Mandatory Spending: Implikasi Bagi Pelayanan Kesehatan." *White Paper: Dari LPBM Bagi Indonesia: Agenda Ekonomi Dan Masyarakat*: 66-86.

Keisha Amanda, Cita amanta nainggolan, Jesika, Rizky Ramadhan Iralin, Ati Yuniati

Belanja Daerah Atau Belanja Kekuasaan: Menguji Konsistensi Antara Prioritas Anggaran Dan Kebutuhan Riil Masyarakat Dalam Kebijakan Fiskal

Wawancara juga mengungkap bahwa 72% responden mengakui adanya intervensi politik dalam proses penganggaran. Temuan ini konsisten dengan hasil analisis regresi yang menunjukkan korelasi kuat antara faktor politik dan alokasi anggaran ($r = 0,78$). Pendekatan mixed methods dalam penelitian ini berhasil mengintegrasikan dimensi “penyebab” melalui data kualitatif dan dimensi “pengukuran” melalui analisis kuantitatif secara komprehensif.

Implikasi Fiskal dan Rekomendasi Kebijakan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan APBD masih cenderung berpihak pada kepentingan elite dibandingkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada tujuan ke-3 (kesehatan), ke-4 (pendidikan), dan ke-11 (kota dan permukiman berkelanjutan). Dominasi faktor politik dalam penganggaran juga sejalan dengan temuan Sjahrir et al. (2014) terkait praktik klienelisme di tingkat daerah.²¹

Sebagai upaya perbaikan, beberapa rekomendasi kebijakan yang diusulkan antara lain:

- Pengembangan Indeks Alignment APBD oleh DJPK untuk mengukur tingkat kesesuaian antara alokasi anggaran dan kebutuhan masyarakat, disertai mekanisme penalti apabila deviasi melebihi 10%.
- Penguatan partisipasi publik melalui platform e-APBD dengan target validasi masyarakat minimal 80% setiap tahun.
- Penyesuaian skema transfer fiskal, khususnya DAK fisik, agar berbasis pada indikator IPM dan kemiskinan serta disertai sanksi terhadap praktik patronase.
- Penerapan pemantauan berkelanjutan melalui analisis regresi data panel untuk periode 2026–2030 guna mengevaluasi dampak kebijakan secara longitudinal.

Secara keseluruhan, pendekatan mixed methods dalam penelitian ini mampu menghasilkan argumen empiris yang kuat serta memberikan

kontribusi penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pendekatan Keseluruhan

Studi ini memadukan data kuantitatif dari APBD, RPJMD, serta RKPD dengan data kualitatif berupa wawancara dan tinjauan dokumen. Data primer berasal dari survei Musrenbang dan narasumber utama, sedangkan data sekunder meliputi indikator seperti IPM, tingkat kemiskinan, dan akses layanan dasar. Matriks Konsolidasi Perencanaan-Penganggaran (MKPP) dipakai untuk menilai konsistensi program/kegiatan melalui skala: sangat konsisten (>90%), konsisten (70-90%), kurang konsisten (50-70%), atau sangat kurang

Teknik Kuantitatif

Regresi panel data (fixed/random effects) menganalisis kaitan antara alokasi belanja produktif (dependen) dengan faktor seperti politik, transfer fiskal, dan IPM (independen). Uji korelasi Pearson serta Hausman menentukan model optimal, dengan variabel kontrol seperti jadwal pilkada dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengolahan data panel dilakukan via EViews/Stata untuk estimasi koefisien, mengukur kesenjangan antara pagu anggaran dan kebutuhan aktual serta Harmonisasi Fiskal Nasional, Sinkronkan siklus APBN-APBD lewat amandemen UU HKPD, sesuaikan timeline RKPD dengan agenda nasional agar minimalkan duplikasi dan percepat penyerapan DAU/DAK. Kontrol SiLPA serta TKD pasca-audit BPK, dengan kewajiban dialihkan ke sektor produktif di anggaran berikutnya.

Fokus Belanja Prioritas

Tetapkan alokasi minimum 20% APBD untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan, dan utamakan infrastruktur via DAK tematik, sambil tekan belanja pegawai maksimal 40% demi pemerataan. Terapkan data-driven budgeting menggunakan metrik IPM serta kemiskinan, dengan integrasi input Musrenbang hingga 70% dalam RKPD.

Mekanisme Pengawasan

Aktifkan peran DPRD pada monitoring triwulanan, audit eksternal oleh BPKP, serta kemitraan swasta untuk infrastruktur guna efisiensi

DAFTAR PUSTAKA

- Deni Lubis, "Penyusunan Anggaran Belanja Daerah dengan Pendekatan Ad-Daruriyyat Al-Khams/Maqasid as-Syariah: Studi Kasus APBD Kabupaten Bogor Tahun 2011," *Al-Muzara'ah*, Vol. 1 No. 2 (2013), hlm. 119–138; lihat juga Pratama Imam Ghoezali, *Dari Aspirasi Menjadi Aksi: Mengawal Pemerintahan Daerah* (Detak Pustaka, 2025).
- Franky Djafar dan S. AP, *Aspirasi Publik dan Kapasitas Lembaga dalam Perencanaan Pembangunan* (Mega Press Nusantara, 2024);
- Munawaroh Siti, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2010–2022" (2025).
- Ramlia, Citra Dewi. *ANALISIS KONSISTENSI DAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK*. Diss. Universitas andala, 2025.
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*, berbagai tahun; Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPKN), *Data APBD Pemerintah Daerah*, Kementerian Keuangan RI.
- Salsabila Alifita, *Efektivitas Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan PDRB Per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia di Era Desentralisasi Fiskal* (Disertasi, 2026); Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah* (UPP STIM YKPN, 2012).
- Novitasari, Evi. "Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Kemiskinan Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada 38 Kota/Kabupaten Di Jawa Timur 2009-2013)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 3.2* (2014).
- Suhartina, *Belanja Pemerintah, Tata Kelola Pemerintahan, Struktur Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Sulawesi Tahun 2010–2022* (Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2025).
- Aziz, H. Yaya Mulyana Abdul, and M. A. P. Yayan Andri. *Analisis Kebijakan Infrastruktur Indonesia* (Dinamika Konsep dan Studi Kasus). Deepublish, 2024.
- Resty Woro Yuniar, "Indonesia's 'Right to Be Forgotten' Raises Press Freedom Issues," *The Wall Street Journal*, 31 Oktober 2016, <https://www.wsj.com/articles/indonesias-right-to-be-forgotten-raises-press-freedom-issues-1477908348> (diakses 30 Mei 2017).
- ATHA, ATHAYA. "PENGARUH RASIO EFEKTIVITAS, RASIO EFISIENSI DAN KEMANDIRIAN FISKAL TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA PERIODE 2022-2023." (2026).

- Adisa, Regita Cahyani. "PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN DAN PENDIDIKAN, RASIO KETERGANTUNGAN, PENGELUARAN MAKANAN PERKAPITA, DAN KEMISKINAN TERHADAP IPM DI KABUPATEN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017-2022." (2024).
- SOPIAN, MUHAMMAD KEVIN. "EFEKTIVITAS REFOCUSING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (Studi di Provinsi Lampung)." (2022).
- Haryati, Dwi Citra, et al. "Analisis Efisiensi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia: Pendekatan Data Panel." *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 5.3 (2025): 139-153.
- KIRANA, EMIA SRI. "PENGARUH PAD, DAU, DAN DAK TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Study Empiris di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung)." (2017).
- Palayukan, Marselus. "Pengaruh belanja pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia: Studi kasus provinsi Sulawesi Tenggara." *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 12.2 (2019): 74-91.
- Wija, Agnes. *POLITIK ANGGARAN: DINAMIKA PENGELOLAAN RETRIBUSI OBJEK WISATA TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA LOKAL KABUPATEN SAMOSIR*. Diss. Universitas Jambi, 2025.
- Firdaus, Ahmad Heri, et al. *Kajian tengah tahun INDEF 2020: Menata arsitektur ekonomi pasca pandemi*. Indef, 2020.
- Rara, Arinda. *PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGANGGURAN TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2013-2022*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024.
- Khoirunnurofik, Giani Raras, and Ghany Ellantia Wiguna. "Penghapusan Mandatory Spending: Implikasi Bagi Pelayanan Kesehatan." *White Paper: Dari LPEM Bagi Indonesia: Agenda Ekonomi Dan Masyarakat*: 66-86.